

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tuntutan publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) yang memiliki prinsip-prinsip transparansi, partisipatis, dan akuntabel, merupakan isu yang paling krusial semenjak bergulirnya reformasi pemerintahan di Indonesia. Isu tentang *good governance* dan *clean governance* menghendaki perlunya organisasi pemerintah melaksanakan akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban dan dilakukan secara periodik. Dalam era terdahulu, kinerja penyelenggaraan organisasi pemerintah hampir tidak pernah diukur, karena memang tidak adanya target kinerja yang dibebankan. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan organisasi pemerintah masih menggunakan tolak ukur tradisional dimana instrumen kinerja yang sering digunakan masih terbatas pada bagaimana mengalokasikan atau menggunakan sumber daya (input) untuk menghasilkan barang dan jasa (ouput) sesuai rencana yang disepakati, misalnya seberapa besar tingkat penyerapan (realisasi) anggaran dari rencana yang telah ditetapkan atau seberapa tepat output yang direncanakan dapat dicapai. Akibatnya publik tidak pernah dapat menilai pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap jalannya organisasi pemerintah. Padahal sebagai *stake holder*, publik memiliki hak untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban dari organisasi pemerintah itu.

Oleh karena itu untuk merespon hal demikian serta agar pelaksanaan pemerintahan lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, presiden mengeluarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sesuai dengan Perpres tersebut dikembangkanlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis (proses penyusunan rencana strategis) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis adalah salah satu cara untuk mengantisipasi masa depan, perencanaan strategis adalah cara lain untuk membuat keputusan berdasarkan pandangan ke depan (Osborn dan Gaebler, 2000 : 263). Menurut Olsen dan Eadie (Bryson, 2001 : 5) perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa

yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Dari kedua pengertian tentang perencanaan strategis di atas, dapat diambil satu pengertian inti bahwa perencanaan strategis adalah proses penelitian situasi dengan pengumpulan informasi yang secara luas, eksplorasi alternatif, dan menetapkan implikasi masa depan pada keputusan sekarang. Perencanaan strategis berangkat dari logika dasar bahwa dalam lingkungan yang berubah secara cepat dan tak menentu, organisasi harus adaptif dan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan perencanaan dan manajemen secara tepat. Dalam situasi lingkungan yang selalu berubah, maka kemampuan untuk senantiasa melakukan responsibilitas terhadap lingkungan eksternal dari organisasi, serta upaya terus menerus menilai kekuatan dan kelemahan internal, merupakan prasyarat agar organisasi selalu berada pada kondisi strategis. Oleh karena itu proses perumusan perencanaan strategis membutuhkan pemahaman yang luas dan mendalam, serta memaksimalkan sumber daya yang ada, agar perencanaan strategis yang dihasilkan mampu membawa organisasi pada kondisi strategis untuk mencapai tujuannya secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah ini memuat antara lain, Pendahuluan, Gambaran pelayanan perangkat daerah, Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, Tujuan dan sasaran, Strategi dan arah kebijakan, Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan Penutup.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

1.3.2 Tujuan

Pasal 1 poin 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun*”. Selanjutnya pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra RKPD) memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan *pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi dan RPJMN dan bersifat indikatif*”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “*Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat*”.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan, peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, telaahan visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang yaitu 2023-2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Memuat penjelasan indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur staf. Sebagai unsur staf, kedudukan Sekretariat Daerah Kota dalam sistem organisasi pemerintahan sangat strategis karena tugasnya sebagai koordinator seluruh OPD-OPD yang ada.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang meliputi dinas daerah, badan daerah kecamatan dan kelurahan serta pelayanan administratif.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi dan mengoordinasikan 3 (tiga) Asisten.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

1. **Sekretaris Daerah** yang membawahi dan mengoordinasikan :

- 1.1. **Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, yang membawahi dan mengoordinasikan :

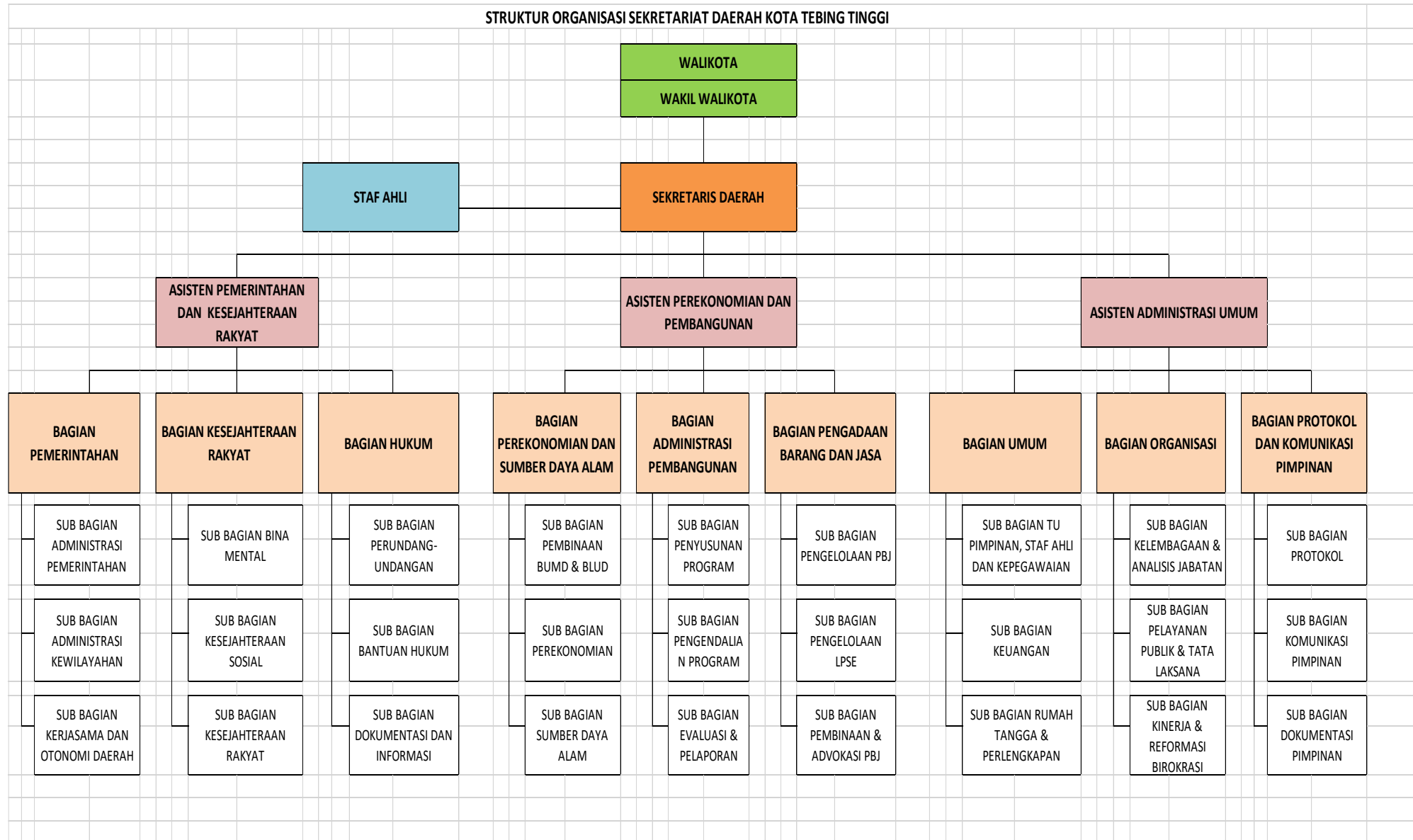
- 1.1.1. **Bagian Pemerintahan**, terdiri dari :
 - 1.1.1.1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - 1.1.1.2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - 1.1.1.3. Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
- 1.1.2. **Bagian Kesejahteraan Rakyat**, terdiri dari :
 - 1.1.2.1. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - 1.1.2.2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - 1.1.2.3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- 1.1.3. **Bagian Hukum**, terdiri dari :
 - 1.1.3.1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - 1.1.3.2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - 1.1.3.3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- 1.2. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**, yang membawahi dan mengoordinasikan :
 - 1.2.1. **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**, terdiri dari :
 - 1.2.1.1. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - 1.2.1.2. Sub Bagian Perekonomian; dan
 - 1.2.1.3. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - 1.2.2. **Bagian Administrasi Pembangunan**, terdiri dari :
 - 1.2.2.1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 1.2.2.2. Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - 1.2.2.3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 1.2.3. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**, terdiri dari :
 - 1.2.3.1. Sub Bagian Bina Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 1.2.3.2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
dan
 - 1.2.3.3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- 1.3 **Asisten Administrasi Umum**, yang membawahi dan mengoordinasikan :
 - 1.3.1 **Bagian Umum**, terdiri dari :
 - 1.3.1.1 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 1.3.1.2 Sub Bagian Keuangan; dan
 - 1.3.1.3 Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 1.3.2 **Bagian Organisasi**, terdiri dari :
 - 1.3.2.1 Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 1.3.2.2 Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - 1.3.2.3 Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

1.3.3 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :

1.3.3.1 Sub Bagian Protokol;

1.3.3.2 Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

1.3.3.3 Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Ada tiga komponen utama yang sangat berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi, yaitu sumber daya aparatur, sumber daya dana, dan sumber daya teknologi. Ketiga sumber daya tersebut saling berinteraksi satu sama lain, saling terkait, dan saling mendukung, namun begitu sumber daya aparatur dinilai sebagai unsur yang paling berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Atas dasar penilaian tersebut, upaya-upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur yang diikuti dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas menjadi fokus utama organisasi dalam peningkatan kapasitas organisasi.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sekretariat yang berkedudukan sebagai unsur staf dengan tugas utama membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan OPD-OPD lainnya, ketersediaan aparatur baik dalam jumlah dan kompetensi mutlak diperlukan. Penilaian kompetensi dalam penempatan dan pengisian formasi jabatan merupakan aspek yang diutamakan, disamping penilaian dari aspek lainnya seperti pengalaman kerja, perilaku, tanggungjawab, dan integritas.

Jumlah ASN perempuan dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di pemerintahan sama besarnya dengan kesempatan bagi kaum laki-laki. Dari jumlah keseluruhan ASN Sekretariat Daerah sebanyak 94 orang, jumlah ASN perempuan saat ini sebanyak 40 orang (42,55%), tentunya tidak berbeda jauh dari jumlah ASN laki-laki yang jumlahnya 54 orang (57,44%). Secara rinci Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin yang terdistribusi pada unit-unit kerja Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah ASN dilingkungan Setdako Tebing Tinggi berdasarkan Jenis Kelamin

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekda	1	-	1
2.	Staf Ahli Walikota	3	-	3
3.	Staf pada Staf Ahli Walikota	-	-	-
4.	Asisten	2	-	2
5.	Bagian Pemerintahan	6	6	12
6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	2	6
7.	Bagian Hukum	4	5	9
8.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2	6	8

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
9.	Bagian Administrasi Pembangunan	3	2	5
10.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	4	13
11.	Bagian Umum	17	5	22
12.	Bagian Organisasi	1	8	9
13.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	6	8
Jumlah		54	40	94

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa distribusi ASN perempuan relatif merata, meskipun di beberapa unit kerja jumlah ASN perempuan lebih banyak dari ASN laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kemampuan ASN perempuan sama besarnya dengan kepercayaan terhadap kemampuan ASN laki-laki.

Sementara itu dilihat dari sisi jumlah, kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan, dan ruang golongan, sumber daya aparatur yang ada sudah cukup memadai. Berikut disajikan profil sumber daya aparatur Sekretariat Daerah berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	1	01,06
2.	SLTP	1	01,06
3.	SLTA	20	21,27
4.	Sarjana Muda/Diploma	4	04,25
5.	S1	55	58,51
6.	S2	13	13,82
J u m l a h		94	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN dengan jenjang pendidikan S1 merupakan jumlah terbanyak yakni 58,51 %, disusul jenjang pendidikan SLTA sebanyak 21,27%, dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 13,82%. Keinginan ASN untuk meningkatkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi menunjukkan trend yang meningkat. Saat ini ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 13,82%, dan akan semakin bertambah karena beberapa ASN sedang menempuh pendidikan S2 baik dengan status tugas belajar maupun ijin belajar.

Sementara itu berdasarkan pangkat dan golongannya, jumlah dan persentasenya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	IV	9	10,11
2.	III	59	66,29
3.	II	19	21,34
4.	I	2	02,24
Jumlah		89	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN dengan pangkat/golongan terendah yaitu Golongan I sudah sangat kecil proporsinya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan jenjang pendidikan yang dimiliki, dimana jenjang pendidikan SD dan SLTP juga proporsinya sangat kecil. Kecilnya jumlah ASN yang Bergolongan I juga terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penerimaan CASN, yang dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi membuka formasi untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik harus diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualifikasi.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan para ASN dan pejabat struktural, Sekretaris Daerah selaku pimpinan OPD selalu mendorong kepada ASN maupun pejabat struktural untuk meningkatkan kompetensi baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis maupun diklat kepemimpinan. Kebijakan peningkatan kemampuan pejabat struktural melalui diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Formasi Jabatan Struktural / Pejabat Struktural /Pejabat Fungsional yang telah Sesuai Diklat Jabatan Struktural /Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

No.	Jabatan Struktural	Jumlah Formasi	Pejabat Struktural Telah Sesuai Pendidikan Struktural	
			Orang	%
1.	Eselon II	7	6	85,71%
2.	Eselon III	9	9	100%
3.	Eselon IV	1	1	100%
4.	Fungsional	26	26	100%

2.2.2. Sumber Daya Dana

Selain sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sumber daya dana merupakan aspek penting lainnya dalam memberhasilkan tujuan organisasi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah terus mengalami peningkatan. Berikut disajikan alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022

TAHUN	BELANJA OPERASIONAL (Juta Rp.)	JUMLAH (Juta Rp.)
2017	17.362.418.611	17.362.418.611
2018	15.411.004.988	15.411.004.988
2019	17.450.357.085	17.450.357.085
2020	16.545.014.419	16.545.014.419
2021	26.617.900.374	26.617.900.374
2022	33,799,025,796	33,799,025,796

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,94%. Fluktuasi alokasi anggaran tersebut tentunya sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi pada saat itu, terutama disesuaikan dengan realitas kebutuhan dan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

2.2.3. Sumber Daya Teknologi

Seiring perkembangan zaman, teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangat berperan dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan efisien dan efektif. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan manfaat. Pertimbangan aspek kebutuhan didasarkan atas analisis bahwa teknologi tersebut mutlak diperlukan karena organisasi akan kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika tidak menggunakan teknologi tersebut. Sementara itu aspek manfaat didasarkan atas analisis bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut organisasi akan menerima manfaat yang signifikan dibandingkan jika tidak menggunakan teknologi tersebut, seperti penyelesaian pekerjaan jauh lebih cepat, akurasi hasil pekerjaan jauh lebih baik, biaya yang

dikeluarkan jauh lebih kecil, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi petugas yang menggunakannya (prinsip ergonomis).

Pengkajian pemanfaatan sumber daya teknologi secara terus menerus dilakukan sehingga organisasi dapat terus berkembang menjadi organisasi modern, efisien, dan berkinerja tinggi. Sumber daya teknologi dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Sumber Daya Teknologi yang digunakan
Pada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi**

No.	Jenis Teknologi	Satuan	Jumlah
1.	Komputer :		
	a. PC	Unit	23
	b. Laptop	Unit	59
	c. Tablet	Unit	5
2.	Aplikasi	Unit	3

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Sebagai organisasi unsur staf yang memiliki tugas dalam perumusan kebijakan dan mengoordinir OPD-OPD, berbagai produk kebijakan teknis telah dihasilkan Sekretariat Daerah. Berbagai produk-produk kebijakan teknis yang kemudian ditetapkan menjadi kebijakan pemerintah daerah diantaranya adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Sementara itu dalam menjalankan tugas sebagai koordinator OPD, pelayanan yang dilaksanakan meliputi mengoordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan, publik, pembangunan daerah, kemasyarakatan, dan pelayanan kedinasan walikota dan wakil walikota, yang kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada masa-masa yang akan terus ditingkatkan, terutama dalam mempersiapkan rancangan-rancangan kebijakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang lebih berkualitas sesuai kebutuhan dan dinamika yang terus berkembang, terutama rancangan kebijakan yang lebih mendorong terciptanya akuntabilitas di jajaran OPD, koordinasi yang lebih meningkat antar-OPD, serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur.

TABEL. C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

1. Bagian Administrasi Pembangunan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	99.16%	95.81%	-	-	-	99.16%	95.81%
2	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	94.43%	96.78%	-	-	-	94.43%	96.78%
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengkoordinasian Bidang perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	86.35%	48.50%	-	-	-	86.35%	48.50%
4	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	96.98%	64.80%	-	-	-	96.98%	64.80%
5	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	99.63%	79.78%	-	-	-	99.63%	79.78%
6	Terlaksananya Pengelolah Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	97.56%	53.10%	-	-	-	97.56%	53.10%

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	-	-															
	Tersedianya makan dan minum pegawai				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	1 thn	1 thn	1 thn	-	-	100%	100%	100%	-
	Terlaksananya Paket Pengadaan barang dan Jasa secara Elektronik				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	-	100%	100%	100%	-	-
	Rasio luas Kantor/Jumlah aparatur																		
	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	1 thn	100%	100%	100%	100%	-
	Terpenuhinya peralatan gedung kantor				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	1 thn	100%	100%	100%	100%	-
	Tingkat ketepatan menyerahkan Laporan kinerja dan Keuangan																		
	Tersusunnya Renstra, Laporan Kinerja Tahunan, Renja, Perjanjian dan Penetapan Kinerja Sekretariat				135 bh	105 bh	105 bh	105 bh	105 bh	135 bh	105 bh	105 bh	-	105 bh	100%	100%	100%	100%	-
	Terselenggaranya koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	1 thn	100%	100%	100%	100%	-
	Acuan dalam penyusunan Anggaran																		
	Tersusunnya buku standar satuan harga sebagai acuan dalam penyusunan anggaran				250 bh	250 bh	250 bh	250 bh	250 bh	250 bh	250 bh	250 bh	-	250 bh	100%	100%	100%	100%	-

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terselenggaranya sosialisasi akses percepatan keuangan daerah				-	-	2 kgt	2 kgt	2 kgt	-	-	-	2 kgt	-	-	-	-	100%	-
	Terselenggaranya penyaluran Rastra				1 thn	-	-	-	-	1 thn	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	<i>Terselenggaranya Promosi dan Kerjasama ekonomi dan Pembangunan</i>																		
	<i>Terkoordinasi dan termonitornya perkembangan perusahaan daerah, koperasi dan UMKM di Kota Tebing Tinggi</i>				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	1 thn	1 thn	1 thn	-	-	100%	100%	100%	-
	<i>Terlaksananya Sosialisasi pengembangan usaha (Diskusi Perspektif Ekonomi)</i>				2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	-	2 kgt	2 kgt	2 kgt	-	-	100%	100%	100%	-
	<i>Terselenggaranya Promosi dan Kerjasama ekonomi dan Pembangunan</i>																		
	Terselenggaranya Operasi Pasar				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya Pameran(Expo) produk Tebing Tinggi				1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	-	-	-	1 Kgt	-	-	-	-	100%	-
	<i>Tersedianya data/informasi harga dan kebijakan distem prosedur pengawasan</i>																		
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan (Terpublikasinya dokumen SiRUP)				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	-	100%	100%	100%	-	-

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)				-	-	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	-	100%	100%	100%	-	-
	Terjaganya stabilitas harga pangan pokok				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	100%	100%	100%	100%	-
	Termonitornya penyaluran LPG bersubsidi				1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	-	100%	100%	100%	100%	-

3. Bagian Umum

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terlaksananya kegiatan kedinasan KDH dan WKDH	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	92,98%	87,09%	94,45%	90,36%	96,65%					

4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio standar kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	-	55%	60%	-	-	-	80,75%	80,5%					

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan yang transparansi berbasis teknologi	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	98,48%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%

6. Bagian Hukum

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terlaksananya pengadaan buku bahan bacaan peraturan perundang-undangan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
2	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	99,81%	100%	-	100%	100%	99,81%	100%	-
3	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	90,75%	99,95%	100%	-	100%	90,75%	99,95%	100%	-
4	Terlaksananya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99,70%	99,90%	96,10%	94,87%	99%	99,70%	99,90%	96,10%	94,87%
5	Tersedianya produk hukum yang dibagikan kepada SKPD dan stakeholder	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	99,82%	99,86%	100%	-	100%	99,82%	99,86%	100%	-
6	Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan stakeholder	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	97%	91,38%	99,66%	100%	86,07%	97%	91,38%	99,66%	100%	86,07%
7	Penanganan perkara yang berhubungan dengan Pemko Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	99,91%	99,90%	91,32%	100%	99,99%	99,91%	99,90%	91,32%
8	Terlaksananya koordinasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	99%	100%	99,74%	99,60%	-	99%	100%	99,74%	99,60%	-
9	Tersedianya jaringan dokumentasi dan informasi hukum	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	82,40%	84,89%	99,99%	87,79%	-	82,40%	84,89%	99,99%	87,79%

7. Bagian Pemerintahan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	93.20	97.39	98.01	99.49	97.22	93.20	97.39	98.01	99.49	97.22
2	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	93.28	97.29	97.92	99.47	97.35	93.28	97.29	97.92	99.47	97.35
3	Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	92.91	97.06	97.59	97.66	95.70	92.91	97.06	97.59	97.66	95.70
4	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	92.76	97.77	97.66	99.78	97.59	92.76	97.77	97.66	99.78	97.59
5	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	98.04	93.87	99.93	99.90	97.64	98.04	93.87	99.93	99.90	97.64
6	Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	92.42	98.34	98.68	99.76	96.69	92.42	98.34	98.68	99.76	96.69
7	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	92.42	98.34	98.68	99.76	96.59	92.42	98.34	98.68	99.76	96.59
8	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	99.41	-	-	-	-	

8. Bagian Organisasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	86,34	86,5	-	-	-	77,02	86,11	-	-	-	89,2%	99,5%
2	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-	-	-	-	78,37	80	-	-	-	60,25	-	-	-	-	76,87%	-
3	Jumlah SKPD yang nilai IKM-nya kategori Sangat Baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	-	-	-	-	-	-	26,53%	30,61%	-	-	-	26,53%	42,85%	-	-	-	100%	139%

9. Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																		
	Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	75%	69%	97%	0%	-					

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	96%	75%	97%	11%	-					
	Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99%	100%	99%	-					
	Pelaksanaan Takbiran Idul Fitri	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-					
	Pelaksanaan Sholat Idul Fitri	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	-					
	Pelaksanaan Takbiran Idul Adha	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	149%	85%	-					
	Pelaksanaan Sholat Idul Adha	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	-					
	Pelaksanaan Tampung Tawar dan Pemberangkatan Jamaah Calon Jemaah Haji Asal Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	84%	-	-					
	Pelaksanaan Tampung Tawar dan Pemulangan/Kembali Jamaah Jemaah Haji Asal Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	92%	96%	100%	-	-					
	Pelaksanaan Kuliah Agama/Bimbingan Rohani di Lingkungan Pemko Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	94%	94%	95%	59%	-					
	Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan LPTQ dan MTQ	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	95%	93%	100%	-	-					
	Pelaksanaan Tablig Akbar dan Haflah Alquran memeriahkan Peringatan Tahun Baru Islam I Muaharram	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	98%	95%	100%	100%	-					
	Pelaksanaan Kegiatan Nuzulul Quran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68%	85%	0%	-					
	Pelaksanaan Halal Bi Halal Pemko Tebing Tinggi dan PNS Beserta Calon Jemaah Haji dan PNS	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	-	-					

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pelaksanaan Gemar Mengaji Ba'da Magrib	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99%	100%	100%	-					
	Pelaksanaan Kegiatan Utusan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	86%	88%	90%	99%	-					
	Kegiatan Perayaan Natal Oikumene Masyarakat se - Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	-					
	Kegiatan Perayaan Natal PNS Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	-					
	Kegiatan BAKOR PAKEM	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	57%	85%	86%	69%	-					
	Perayaan Paskah Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Kegiatan Pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	9%	-					
	Pengembangan Nilai Budaya																		
	Festival Nasyid Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	0%	-					
	Pelaksanaan Festival Seni Budaya Islam Barjanzi dan Marhaba Tingkat Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	72%	-	-					
	Program Wawasan dan Kebangsaan																		
	Upacara Hari Kebangkitan Nasional	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	84%	68%	97%	-	-					
	Upacara Hari Proklamasi Republik Indonesia	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	492%	-					
	Upacara Hari Kesaktian Pancasila	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	-	-					
	Upacara Hari Pahlawan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	75%	83%	48%	4%	-					

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi 1 Juli	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	99%	90%	98%	10%	-					
	Upacara Peringatan Hari KORPRI, Guru/PGRI, Hari Kesehatan di Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	-	-					
	Upacara Hari Peristiwa Berdarah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	90%	72%	-					
	Upacara Hari Lahirnya Pancasila	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-					
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	77%					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-					
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	81%					
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	0%					
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	45%					

TABEL C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

1. Bagian Administrasi Pembangunan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	133.188.800	-	-	-	-	132.065.300	-	-	-	-	99.16	-		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	175.876.700	-	-	-	-	166.075.000	-	-	-	-	94.43	-		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	197.778.100	-	-	-	-	170.781.900	-	-	-	-	86.35	-		
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan																	
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	-	-	-	303.191.800	-	-	-	-	302.064.400	-	-	-	-	99.63	-		
Program Pengembangan Data/Informasi																	
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	-	-	-	36.800.000	-	-	-	-	35.687.500	-	-	-	-	96.98	-		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	-	24.600.000	-	-	-	-	24.000.000	-	-	-	-	97.56	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	9.970.400	-	-	-	-	4.836.000	-	-	-	-	48.50		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	56.035.900	-	-	-	-	40.357.900	-	-	-	-	72.02		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	224.961.000	-	-	-	-	215.529.668	-	-	-	-	95.81		
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	23.041.400	-	-	-	-	17.588.000	-	-	-	-	76.33		
Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-	-	166.838.100	-	-	-	-	164.805.000	-	-	-	-	98.78		
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	-	102.675.000	-	-	-	-	66533.040	-	-	-	-	64.80		
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	-	280.886.000	-	-	-	-	224.080.540	-	-	-	-	79.78		
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	-	148.354.500	-	-	-	-	78778.500	-	-	-	-	53.10		

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi perkantoran																	
Penyediaan makanan dan minuman	-	7.000.000	6.832.000	7.352.000	-	-	6.356.000	6.809.600	7.323.000	-	-	90,80	99,67	99,60	-		
Pelayanan operasional LPSE	684.004.000	576.750.000	297.145.990	-	-	472.236.000	549.179.428	270.852.350	-	-	69,04	95,22	91,15	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72.700.000	38.700.000	108.400.000	103.150.000	-	72.625.000	38.225.000	106.800.000	102.675.000	-	99,90	98,77	98,52	99,53	-		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	142.250.000	25.000.000	85.300.000	17.300.000	-	136.225.000	24.900.000	84.555.000	17.300.000	-	95,76	99,60	99,12	100	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	28.562.700	33.565.000	39.348.400	4.866.400	-	19.497.500	32.938.000	39.165.000	4.812.700	-	68,26	98,13	99,53	98,89	-		
Koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	350.835.000	196.410.000	336.832.140	243.883.000	-	174.506.300	180.040.879	292.211.895	238.526.302	-	49,74	91,66	86,75	97,80	-		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	
Penyusunan standar satuan harga	86.455.000	120.530.000	140.342.650	149.682.500	-	84.370.000	118.267.500	124.782.900	148.592.800	-	97,58	98,12	88,91	99,27	-		
Pembinaan dan Operasional OPK Raskin	272.444.500	305.541.400	-	-	-	177.658.575	242.177.340	-	-	-	65,20	79,26	-	-	-		
Sosialisasi percepatan akses keuangan daerah	-	-	-	266.124.500	-	-	-	-	260.631.700	-	-	-	-	97,93	-		
Koordinasi dan fasilitasi pengawasan pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	8.449.300	-	-	-	-	6.133.550	-	-	-	-	72,59	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
Operasi Pasar	25.975.000	45.065.000	47.972.100	52.476.700	-	24.345.000	37.441.000	45.331.000	52.105.000	-	93,72	83,08	94,49	99,29	-		
Promosi (Promosi) Potensi Daerah	-	-	-	54.773.000	-	-	-	-	51.978.200	-	-	-	-	94,89	-		
Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan																	
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	103.501.000	110.720.000	204.016.350	-	-	100.976.000	105.158.750	193.284.000	-	-	97,56	94,97	94,73	-	-		
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	147.140.000	161.100.000	220.430.500	205.310.400	-	136.902.800	152.957.950	203.179.400	200.425.250	-	93,04	94,94	92,17	97,62	-		
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran LPG	86.981.000	105.969.000	157.958.500	147.933.600	-	66.252.500	96.133.300	145.640.000	145.367.200	-	76,16	90,71	92,20	98,26	-		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah																	
Koordinasi, monitoring dan evaluasi perkembangan perusahaan daerah, koperasi dan UMKM	-	20.515.000	36.697.600	29.951.800	-	-	18.872.500	32.591.500	29.943.800	-	-	91,99	88,81	99,97	-		
Sosialisasi Pengembangan Usaha	-	113.304.100	119.733.500	123.857.800	-	-	113.095.500	119.129.500	121.081.000	-	-	99,81	99,49	97,75	-		
Program Perekonomian dan Pembangunan																	
Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-	-	1.118.319.500					969.156.420							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	-	74.102.700	-	-	-	-	73.805.050	-	-	-	-	99,60		
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	-	876.153.300	-	-	-	-	736.756.970	-	-	-	-	84,08		
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	-	-	168.063.500	-	-	-	-	158.594.400	-	-	-	-	94,36		
Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	231.739.100					208.592.400							
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	5.880.100	-	-	-	-	3.966.500	-	-	-	-	67,45		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	6.053.200	-	-	-	-	4.486.600	-	-	-	-	74,12		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-	-	219.805.800	-	-	-	-	200.139.300	-	-	-	-	91,05		

3. Bagian Umum

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	9.827.386.652	0	0	0	0	9.827.386.652	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	9.549.800	0	0	0	0	9.549.800	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	0							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	368.000.000	0	0	0	0	366.184.585	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,51%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	99.970.500	0	0	0	0	94.179.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,21%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	29.838.000	0	0	0	0	29.836.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	162.558.800	0	0	0	0	159.917.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,38%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	178.816.800	0	0	0	0	139.282.600	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,89%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	97.272.000	0	0	0	0	96.209.700	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,91%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	2.091.617.300	0	0	0	0	2.080.403.004	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,46%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	2.020.196.000	0	0	0	0	1.910.387.172	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,56%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	702.970.000	0	0	0	0	589.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,79%		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Mebel	0	0	0	0	369.619.294	0	0	0	0	297.453.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,48%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	633.161.800	0	0	0	0	540.240.400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,32%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	1.112.424.728	0	0	0	0	889.338.483	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,95%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	0	1.784.436.000	0	0	0	0	1.740.778.320	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,55%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	1.192.090.000	0	0	0	0	1.180.249.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,01%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	282.115.300	0	0	0	0	276.020.550	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,84%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	167.664.700	0	0	0	0	165.844.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,91%		
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0	0	0	0	480.000.000	0	0	0	0	480.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0	432.000.000	0	0	0	0	432.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	571.800.000	478.800.000	0	0	0	571.601.000	478.104.560	0	0	0	99,97%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/ Majalah	952.800.000	1.089.720.000	1.161.600.000	1.191.600.000	0	866.095.433	1.057.284.488	1.046.014.282	926.205.852	0	90,90%	97,02%	90,05%	77,73%	0,00%		
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	285.000.000	270.000.000	420.000.000	381.000.000	0	264.908.439	269.245.439	403.865.303	380.459.279	0	92,95%	99,72%	96,16%	99,86%	0,00%		
Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kantor	856.400.000	952.400.000	1.503.940.000	1.795.064.604	0	853.234.200	937.615.920	1.495.607.270	1.731.476.065	0	99,63%	98,45%	99,45%	96,46%	0,00%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	152.300.000	120.000.000	82.829.330	54.833.100	0	149.170.500	119.925.250	82.820.215	54.791.300	0	97,95%	99,94%	99,99%	99,92%	0,00%		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.400.000	20.000.000	16.971.925	32.768.450	0	80.960.550	19.836.125	16.966.000	32.760.400	0	94,80%	99,18%	99,97%	99,98%	0,00%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	49.459.100	40.000.000	40.000.000	26.028.730	0	45.938.150	39.811.000	39.734.200	25.967.100	0	92,88%	99,53%	99,34%	99,76%	99,99%		
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	1.598.890.879	1.330.000.000	1.455.000.000	577.566.800	0	1.594.894.072	1.325.815.192	1.302.351.453	409.427.566	0	99,75%	99,69%	89,51%	70,89%	0,00%		
Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	137.500.000	150.000.000	150.000.000	0	0	76.052.082	79.708.911	26.767.563	0	0	55,31%	53,14%	17,85%	0,00%	0,00%		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.117.900.000	1.137.434.488	0	550.000.000	0	951.297.780	1.137.434.488	0	549.800.000	0	85,10%	100,00%	0,00%	99,96%	0,00%		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	430.930.000	299.125.000	1.093.706.000	89.270.000	0	421.150.000	294.604.500	1.061.242.770	83.455.000	0	97,73%	98,49%	97,03%	93,49%	0,00%		
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	571.144.800	190.800.000	287.247.000	252.505.000	0	541.489.300	174.116.063	262.065.000	252.105.000	0	94,81%	91,26%	91,23%	99,84%	0,00%		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.455.000	12.000.000	0	0	0	20.455.000	11.950.000	0	0	0	100,00%	99,58%	0,00%	0,00%	0,00%		
Pengadaan Mebeleur	66.600.000	0	552.394.000	223.400.000	0	65.730.000	0	526.490.000	223.400.000	0	98,69%	0,00%	95,31%	100,00%	0,00%		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	1.035.420.911	876.061.000	300.000.000	354.784.000	0	1.028.734.999	806.987.600	296.135.745		0	99,35%	92,12%	98,71%	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	519.034.500	239.153.000	45.000.000	453.306.360	0	491.223.970	239.146.700	44.800.000	451.995.925	0	94,64%	100,00%	99,56%	99,71%	0,00%		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	646.474.000	1.122.300.000	1.433.167.200	1.490.676.900	0	614.904.209	1.094.440.250	1.421.664.450	1.489.363.000	0	95,12%	97,52%	99,20%	99,91%	0,00%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	78.732.500	15.000.000	15.000.000	59.081.175	0	62.714.300	14.896.000	14.387.420	58.761.350	0	79,65%	99,31%	95,92%	99,46%	0,00%		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	112.000.000	105.000.000	168.000.000	172.976.000	0	92.966.509	104.919.300	164.413.400	172.689.400	0	83,01%	99,92%	97,87%	99,83%	0,00%		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	103.500.000	40.000.000	20.000.000	185.000.000	0	101.276.000	40.000.000	19.439.000	183.785.000	0	97,85%	100,00%	97,20%	99,34%	0,00%		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler	85.000.000	40.000.000	40.000.000	10.000.000	0	72.279.000	38.352.500	39.692.400	9.892.000	0	85,03%	95,88%	99,23%	98,92%	0,00%		
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	835.250.000	0	0	0	0	835.196.250	0	0	0	0	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan Taman	24.860.500	25.000.000	50.000.000	0	0	24.860.500	24.929.000	49.185.000	0	0	100,00%	99,72%	98,37%	0,00%	0,00%		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Hibah barang kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	0	0	165.000.000	0	0	0	0	162.210.000	0	0	0,00%	0,00%	98,31%	0,00%	0,00%		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60.550.000	78.000.000	100.000.000	92.425.000	0	56.050.000	77.428.000	91.360.000	92.425.000	0	92,57%	99,27%	91,36%	100,00%	0,00%		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	118.728.000	0	0	0	0	109.968.920	0	0	0	0	92,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN																	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.379.600	6.846.000	6.846.000	5.000.000	0	5.356.000	6.780.000	6.705.900		0	83,96%	99,04%	97,95%	0,00%	0,00%		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH																	
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	605.000.000	505.000.000	727.000.000	793.647.000	0	554.242.500	428.918.800	714.730.000	777.275.600	0	91,61%	84,93%	98,31%	97,94%	0,00%		
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah Lainnya	1.134.109.121	1.520.000.000	1.610.000.000	547.000.000	0	766.930.257	657.487.565	1.408.084.350	319.493.068	0	67,62%	43,26%	87,46%	58,41%	0,00%		
Belanja Rumah Tangga KDH Dan Wakil KDH	671.000.000	920.000.000	912.000.000	912.000.000	0	663.000.000	608.000.000	912.000.000	912.000.000	0	98,81%	66,09%	100,00%	100,00%	0,00%		
Penerimaan Kunjungan Tamu - Tamu Pejabat Vertikal dan Kunjungan Acara Seremonial	898.250.000	700.000.000	832.225.000	734.142.000	0	891.029.000	620.300.000	829.856.500	729.656.500	0	99,20%	88,61%	99,72%	99,39%	0,00%		
Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah Dengan Masyarakat	666.950.000	556.950.000	1.151.680.000	619.558.000	0	600.050.000	474.075.000	1.104.503.350	617.770.250	0	89,97%	85,12%	95,90%	99,71%	0,00%		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																	
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	79.791.500	0	0	0	0	79.791.500	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				501.009.000	579.098.200				480.924.548	562.346.800							
Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				501.009.000	579.147.200				480.924.548	562.346.800							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan				214.598.800	149.343.000				205.344.140	144.539.680							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				191.850.600	200.509.800				186.295.204	196.518.080							
Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan				94.559.600	229.245.400				89.285.204	221.289.040							

5. Pengadaan Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	10.000.000,-	-	-	-	-	10.000.000,-	-	-	-	-	100%	-	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	5.000.000,-	-	-	-	-	4.992.000,-	-	-	-	-	99,84%	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah	-	-	35.000.000,-	99.360.000,-	-	-	-	31.893.137	84.561.348,-	-	-	-	91,12%	85,11%	-		
Pelayanan operasional LPSE	-	-	348.980.400,-	122.511.500,-	-	-	-	270.456.250,-	117.316.000,-	-	-	-	77,50%	95,76%	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	24.000.000,-	43.000.000,-	-	-	-	23.800.000,-	42.768.000,-	-	-	-	99,17%	99,46%	-		
Pengadaan mebeleur	-	-	20.500.000,-	-	-	-	-	20.500.000,-	-	-	-	-	98,78%	-	-		
Program Peningkatan dan Pengembangan Barang dan Jasa																	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	228.180.000,-	-	-	-	-	209.764.924,-	-	-	-	-	91,93%	-		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	369.670.400,-	-	-	-	-	352.778.640,-	-	-	-	-	95,43%		
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	-	-	-	-	393.540.200,-	-	-	-	-	339.158.413,-	-	-	-	-	86,18%		
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	136.246.800,-	-	-	-	-	79.176.900,-	-	-	-	-	58,11%		

6. Bagian Hukum

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	2.808.000	-	-	3.000.000	3.000.000	2.808.000	-	-	100%	100%	100%	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9.900.000	3.500.000	9.438.000	2.900.000	-	9.900.000	3500.000	9.420.000	2.900.000	-	100%	100%	99,81%	100%	-		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17.500.000	10.000.000	17.688.330	30.360.000	-	17.500.000	9.075.000	17.680.000	30.360.000	-	100%	90,75%	99,95%	100%	-		
Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	270.840.000	264.240.000	371.724.575	345.968.500	-	269.262.000	263.439.000	371.335.200	332.476.500	-	99,41%	99,70%	99,90%	96,10%	-		
Publikasi Peraturan Perundang-undangan	48.280.000	46.000.000	68.200.000	46.500.000	-	48.240.000	45.916.000	68.102.000	46.500.000	-	99,91%	99,82%	99,86%	100%	-		
Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum	105.920.000	109.080.000	118.563.200	24.167.000	-	102.920.000	99.680.000	118.157.000	24.167.000	-	97%	91,38%	99,66%	100%	-		
Fasilitasi Hukum Kepada Pejabat/ Aparatur dilingkungan Pemko Tebing Tinggi	268.520.000	290.720.000	290.426.300	183.657.900	-	268.400.000	290.690.000	290.175.625	183.475.750	-	99,95%	99,99%	99,91%	99,90%	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000	60.000.000	100.000.000	20.000.000	-	59.276.700	60.000.000	99.736.575	19.920.800	-	98,79%	100%	99,74%	99,60%	-		
Pembuatan Jaringan Dokumentasi Infomasi Hukum (JDIH) Pemko Tebing Tinggi	-	30.675.000	17.145.595	7.221.000	-	-	25.275.000	14.555.000	7.220.400	-	-	82,40%	84,89%	99,99%	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	49.525.200	-	-	-	-	42.626.200	-	-	-	-	86,07%		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																	
Kegiatan Fasilitasi dan Korrdinasi Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	-	-	390.056.800	-	-	-	-	370.052.700	-	-	-	-	94,87%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	-	245.741.000	-	-	-	-	224.407.700	-	-	-	-	91,32%		
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	-	49.513.200	-	-	-	-	43.467.500	-	-	-	-	87,79%		

7. Bagian Pemerintahan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata-rata pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1,976,393,000	1,365,355,000	1,173,742,020	876,784,596	1,378,503,900	1,841,958,895	1,329,669,532	1,150,389,890	872,335,584	1,340,242,451	93.20	97.39	98.01	99.49	97.22	-3.26	-2.96
Administrasi Tata Pemerintahan	1,796,313,000	1,236,415,000	1,033,768,020	803,965,656	1,110,083,300	1,675,537,695	1,202,870,427	1,012,259,500	799,689,044	1,080,707,488	93.28	97.29	97.92	99.47	97.35	-7.93	-7.48
Penataan Administrasi Pemerintahan	628,298,000	131,800,000	345,931,200	126,055,056	146,226,700	583,746,953	127,920,550	337,583,633	123,101,344	139,945,800	92.91	97.06	97.59	97.66	95.70	8.97	-1.57
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1,009,675,000	976,285,000	559,286,220	534,989,000	748,523,800	936,547,742	954,483,614	546,215,667	533,810,500	730,520,388	92.76	97.77	97.66	99.78	97.59	-2.61	10.66
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	158,340,000	128,330,000	128,550,600	142,921,600	215,332,800	155,243,000	120,466,263	128,460,200	142,777,200	210,241,300	98.04	93.87	99.93	99.90	97.64	10.77	48.74
Fasilitasi Kerjasama Daerah	180,080,000	128,940,000	139,974,000	72,818,940	268,420,600	166,421,200	126,799,105	138,130,390	72,646,540	259,534,963	92.42	98.34	98.68	99.76	96.69	50.20	48.74
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	180,080,000	128,940,000	139,974,000	72,818,940	258,952,300	166,421,200	126,799,105	138,130,390	72,646,540	250,122,863	92.42	98.34	98.68	99.76	96.59	46.95	45.51
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	-	-	-	-	9,468,300	-	-	-	-	9,412,100	-	-	-	-	99.41	-	-

8. Bagian Organisasi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.000.000	115.000.000	170.475.000	53.770.476		27.565.291	114.995.265	161.605.777	53.770.476		92%	100%	95%	100%			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	30.000.000	115.000.000	170.475.000	53.770.476		27.565.291	114.995.265	161.605.777	53.770.476		92%	100%	95%	100%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	74.100.000	79.000.000	57.500.000	82.385.700		72.930.000	75.860.000	57.345.000	82.110.000		98%	96%	100%	100%			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	37.700.000	39.000.000	3.500.000	20.585.600		37.330.000	39.000.000	3.500.000	20.533.000		99%	100%	100%	100%			
Pengadaan peralatan gedung kantor	36.400.000	40.000.000	54.000.000	61.800.100		35.600.000	36.860.000	53.845.000	61.577.000		98%	92%	100%	100%			
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	195.900.000					191.323.800					98%						
Penataan susunan organisasi perangkat daerah	86.640.000					82.550.900					95%						
Koordinasi penyusunan pedoman pelayanan publik	19.160.000					19.120.000					100%						

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan analisa jabatan dan analisis beban kerja	56.100.000					55.752.900					99%						
Pemetaan Jabatan Fungsional Umum dan Fungsi tertentu	34.000.000					33.900.000					100%						
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		67.170.000	76.341.150	64.677.400			66.016.300	51.143.500	57.055.700			98%	67%	88%			
Penyusunan analisa jabatan dan analisis beban kerja		67.170.000	76.341.150	64.677.400			66.016.300	51.143.500	57.055.700			98%	67%	88%			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		165.172.000	417.811.400	236.677.500			158.072.222	385.107.250	212.804.300			96%	92%	90%			
Penataan susunan organisasi perangkat daerah		112.600.000	145.272.000	106.586.600			107.273.322	133.251.000	103.667.900			95%	92%	97%			
Koordinasi penyusunan pedoman pelayanan publik		18.710.000	159.157.400	21.228.900			17.886.900	153.906.440	21.096.000			96%	97%	99%			
Pemetaan Jabatan Fungsional Umum dan Fungsi Tertentu		33.862.000	-	-			32.912.000					97%					
Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi			84.087.500	108.862.000				76.235.310	88.040.400				91%	81%			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik			29.294.500	-				21.714.500					74%				
Program Pembinaan Kinerja Pemerintahan Daerah		147.233.400	115.435.000	54.351.250			72.418.900	108.583.538	61.194.850			49%	94%	113%			
Laporan kinerja pemerintahan		38.016.400	67.945.000	43.673.550			37.363.900	67.755.338	43.673.550			98%	100%	100%			
Penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan pemerintahan kota Tebing Tinggi		109.217.000	47.490.000	10.677.700			35.055.000	40.828.200	17.521.300			32%	86%	164%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					689.436.400					634.011.147						92%	
Penataan Organisasi					689.436.400					634.011.147						92%	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan					263.982.000					226.311.700						86%	
Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					35.837.800					33.866.200						94%	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					87.043.400					84.481.600						97%	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					231.061.600					222.529.147					96%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					71.511.600					66.822.500					93%		

9. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																	
Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW	290.586.500	255.700.000	148.847.500	68.387.200		217.748.500	176.200.000	144.423.100	0								
Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	264.300.000	255.800.000	147.847.500	36.150.9000		254.989.000	190.856.200	143.802.700	39.150.900								
Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan	862.155.000	849.520.000	963.300.800	464.434.650		847.807.500	844.720.000	962.300.800	457.980.900								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Takbiran Idul Fitri	30.700.000	29.300.000	28.044.000	2.907.500		30.700.000	29.300.000	28.044.000	2.907.500								
Pelaksanaan Sholat Idul Fitri	47.300.000	47.500.000	47.315.000	7.239.400		46.300.000	47.500.000	47.315.000	7.239.400								
Pelaksanaan Takbiran Idul Adha	20650.000	26.350.000	20.360.250	1.293.000		20650000	26.350.000	30.360.250	1.098.000								
Pelaksanaan Sholat Idul Adha	42.160.000	61.360.000	59.526.000	12.161.400		42.160.000	61.360.000	59.526.000	7.239.400								
Pelaksanaan Tampung Tawar dan Pemberangkatan Jamaah Calon Jemaah Haji Asal Kota Tebing Tinggi	395.995.000	388.085.000	700.935.000	0		389.453.000	386.370.000	586.278.504	0								
Pelaksanaan Tampung Tawar dan Pemulangan/Kembali Jamaah Jemaah Haji Asal Kota Tebing Tinggi	117.505.000	108.605.000	57.452.000	0		108.465.000	104.605.000	57.452.000	0								
Pelaksanaan Kuliah Agama/Bimbingan Rohani di Lingkungan Pemko Tebing Tinggi	530.600.000	587.000.000	579.672.000	567.192.000		500.380.000	548.930.000	550.294.000	336.236.000								
Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan LPTQ dan MTQ	865.300.000	892.900.000	917.181.900	0		821.422.000	831.100.000	915.851.900	0								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Tablig Akbar dan Haflah Alquran memeriahkan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muaharram	310.700.000	379.170.000	303.991.500	7.475.000		305.947.300	358.670.000	302.991.500	7.475.000								
Pelaksanaan Kegiatan Nuzulul Quran	47.944.000	43.700.000	33.920.000	7.085.000		47.944.000	29.700.000	28.920.000	0								
Pelaksanaan Halal Bi Halal Pemko Tebing Tinggi dan PNS Beserta Calon Jemaah Haji dan PNS	121.509.000	114.370.000	104.002.000	0		121.309.000	114.170.000	98.190.000	0								
Pelaksanaan Gemar Mengaji Ba'da Magrib	853.410.000	967.850.000	983.567.800	977.734.600		836.810.000	955.850.000	983.567.800	976.624.600								
Pelaksanaan Kegiatan Utusan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional	342.000.000	337.000.000	318.172.300	703.872.600		294.486.000	297.000.000	285.032.300	695.792.600								
Kegiatan Perayaan Natal Oikumene Masyarakat se - Kota Tebing Tinggi	181.600.000	184.200.000	176.310.000	251.330.000		181.600.000	181.200.000	176.310.000	251.330.000								
Kegiatan Perayaan Natal PNS Kota Tebing Tinggi	57.600.000	56.350.000	53.680.000	107.540.000		56.600.000	55.350.000	53.680.000	107.040.000								
Kegiatan BAKOR PAKEM	275.440.000	289.300.000	243.444.160	478.239.300		157.860.000	246.910.000	209.821.500	330.140.900								
Perayaan Paskah Masyarakat Kota Tebing Tinggi	114.690.000	105.400.000	83.763.000	0		114.690.000	105.400.000	83.763.000	0								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di kota Tebing Tinggi			1.187.329.800	3.514.436.3000				1.187.329.800	3.271.205.200								
Pengembangan Nilai Budaya																	
Festival Nasyid Kota Tebing Tinggi	603.950.000	622.950.000	405.499.000	350.739.100		596.950.000	622.950.000	404.669.000	0								
Pelaksanaan Festival Seni Budaya Islam Barjanzi dan Marhaba Tingkat Kota Tebing Tinggi	36.000.000	172.320.000	97.294.200	0		36.000.000	159.820.000	70.355.200	0								
Program Wawasan dan Kebangsaan																	
Upacara Hari Kebangkitan Nasional	48.170.000	36.700.000	26.785.460	0		40.520.000	24.950.000	26.002.360	0								
Upacara Hari Proklamasi Republik Indonesia	242.320.000	193.850.000	136.652.790	220.810.300		230.820.000	193.850.000	136.382.790	108.621.4000								
Upacara Hari Kesaktian Pancasila	35.610.000	31.450.000	39.678.560	0		35.610.000	31.450.000	36.208.560	0								
Upacara Hari Pahlawan	57.420.000	89.095.000	93.688.460	122.483.4000		42.920.000	74.220.000	44.546.660	45.621.700								
Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi 1 Juli	880.520.500	855.530.000	534.223.730	227.276.2000		867.567.000	772.610.400	521.928.730	217.008.200								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Upacara Peringatan Hari KORPRI, Guru/PGRI, Hari Kesehatan di Kota Tebing Tinggi	35.190.000	32.590.000	38.641.660	0		35.190.000	32.590.000	38.291.660	0								
Upacara Hari Peristiwa Berdarah	45.840.000	42.900.000	54.856.660	43.505.500		45.840.000	42.400.000	49.411.660	31.468.000								
Upacara Hari Lahirnya Pancasila				0					0								
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					7.108.743.300					5.761.512.400							
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					15.000.000					0							
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					825.388.500					368.769.500							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Sebagai organisasi pembelajar (*the learner organization*) yang tanggap terhadap tuntutan perkembangan yang makin dinamis, semua organisasi pemerintah tak terkecuali Sekretariat Daerah menghadapi tantangan yang makin serius. Tantangan yang dihadapi terkait pengembangan pelayanan OPD secara deskriptif dijelaskan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada semua tingkatan pemerintahan, termasuk semua lembaga dan organisasi pemerintah. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Mengingat reformasi birokrasi merupakan sebuah tujuan, keberhasilan reformasi birokrasi dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator reformasi birokrasi, yaitu :

- tidak ada korupsi
- tidak ada pelanggaran/sanksi;
- pengelolaan keuangan baik;
- semua program selesai dengan baik;
- semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- komunikasi dengan publik baik;

- penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;
- hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolapsangan kerja, dan propengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Dengan berlandaskan atas tujuan dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi sebagaimana telah disebutkan di atas, pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah dikonstruksi menjadi sebuah organisasi yang akan proaktif melaksanakan agenda reformasi birokrasi dengan berlandaskan atas indikator-indikator keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi yang ada. Hal ini menjadi tantangan luar biasa yang harus dihadapi Sekretariat Daerah, mengingat kondisi internal organisasi masih dihadapkan pada permasalahan-pemsalahan klasik dan tradisional, seperti kompetensi sumber daya aparatur, keterbatasan anggaran, sistem penggajian yang belum berorientasi remunerasi, serta lingkungan strategis lain yang belum mendukung dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi.

2. Perubahan Peraturan dan Perundang-undangan yang makin dinamis

Perkembangan yang demikian pesat dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan, menciptakan banyak perubahan. Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis tersebut berimplikasi semakin banyaknya peraturan dan perundang-perundangan yang diterbitkan, baik peraturan perundangan baru maupun peraturan perundangan sebagai perubahan atau penyempurnaan terhadap peraturan perundangan sebelumnya. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan atau kementerian yang dalam implementasinya belum sempat ditindaklanjuti atau bahkan belum dipahami sepenuhnya oleh daerah, namun sudah muncul peraturan baru atau peraturan perubahannya. Kondisi ini tentu saja menyebabkan kebingungan bagi aparatur di daerah, tidak saja secara teknis kesulitan dalam penerapannya, namun lebih dari itu dari aspek hukum dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

Cepatnya perubahan peraturan perundangan yang berlaku tentu menjadi tantangan bagi organisasi di daerah, yakni bagaimana dapat mengakses berbagai peraturan tersebut dengan cepat, mempelajari dan memahami peraturan tersebut, mempersiapkan rancangan peraturan sebagai tindaklanjutnya, mendiseminasikan peraturan tersebut kepada *stake holder* yang terkait, serta mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik. Dibutuhkan daya tanggap yang tinggi dari aparatur terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Partisipasi dan Sikap Kritis Masyarakat

Perubahan sistem politik pasca berakhirnya kekuasaan orde baru, menyebabkan begitu banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya berdampak terhadap perubahan dalam sistem pemerintahan tetapi juga berdampak terhadap perubahan dalam sistem sosial dan perilaku masyarakat. Era transparansi dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk turut berperan menjadi bagian dari sistem bernegara yang *civil society*. Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di seluruh daerah dalam jumlah yang cukup banyak, yang dalam pelaksanaan fungsinya lebih berorientasi dalam melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah, memberikan manfaat sangat positif untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah maupun organisasi pemerintah menjadi lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik, karena jika tidak, akan berhadapan dengan sikap kritis masyarakat. Demonstrasi atau unjuk rasa dari elemen-elemen masyarakat, baik mahasiswa, pelajar, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk nyata dari aktualisasi sikap kritis masyarakat terhadap apa saja yang menurut mereka tidak sesuai dengan nilai atau keinginan mereka, yang suka dan tidak suka harus diperhatikan. Meskipun dalam era demokrasi hal-hal tersebut merupakan sebuah kewajaran, namun jika intensitas dan kualitas dampak negatif dari aksi-aksi sikap kritis masyarakat tersebut sudah melewati batas kewajaran, tentunya akan mengganggu kinerja pemerintahan. Kecenderungan semakin meningkatnya sikap kritis masyarakat tentunya menjadi tantangan bagi organisasi pemerintahan untuk :

1. menyelenggarakan organisasi publik yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partipatif, dan akuntabilitas;
2. memberikan pelayanan publik yang prima dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*);
3. meniadakan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan organisasi publik;
4. mengutamakan objektivitas dan kepentingan masyarakat banyak dalam melahirkan kebijakan publik.

Meskipun sikap kritis masyarakat memiliki kecenderungan yang meningkat baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam aspek lain. Di bidang politik misalnya, dalam beberapa penyelenggaraan Pemilu Legislatif tingkat nasional dan daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian suara atau hak pilihnya, mengalami kecenderungan yang semakin menurun. Demikian pula halnya dalam Pemilu Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Walikota, menunjukkan fenomena yang hampir sama

dengan apa yang terjadi dalam proses Pemilu Legislatif, yakni jumlah masyarakat yang memberikan suara atau hak pilihnya semakin menurun. Sementara itu, dalam kegiatan gotong royong, saat ini semakin sulit menghadirkan masyarakat dalam bergotong-royong, meskipun gotong royong di lingkungan mereka sendiri. Padahal gotong royong merupakan budaya luhur nenek moyang Bangsa Indonesia yang sudah turun temurun diwariskan dan hidup di tengah-tengah masyarakat, namun saat ini semakin sulit dipertahankan karena adanya krisis jati diri individu-individu yang semakin mementingkan diri sendiri. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tentunya menjadi tantangan bagi organisasi pemerintah untuk bagaimana :

1. membangkitkan kembali partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan mendorong masyarakat agar secara aktif berinteraksi dengan lingkungan untuk terciptanya sistem sosial yang pluralis dan dinamis;
2. membangun kinerja organisasi yang baik untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah;
3. pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang strategis agar masyarakat turut serta berpartisipasi di dalamnya karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan tersebut.

2.4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Meskipun Sekretariat Daerah dalam rangka pengembangan pelayanan OPD menghadapi tantangan yang cukup besar, berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan OPD. Peluang-peluang yang dimiliki tersebut secara deskriptif dijelaskan sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat atau golongan ruang, serta pendidikan dan latihan yang dimiliki, kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah telah cukup memadai. Pentingnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas, merupakan dasar pertimbangan pimpinan dalam menempuh kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Kebijakan tersebut ditempuh dalam bentuk pengiriman tugas belajar ke jenjang S1 dan S2, pemberian ijin belajar S1 dan S2, pengiriman pejabat struktural untuk mengikuti Diklat Pim IV, III, dan II, serta pengiriman pejabat maupun ASN untuk mengikuti diklat teknis sesuai bidang kelimuan masing-masing.

Investasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang dilakukan selama ini, tentunya bermanfaat untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berat di masa-masa mendatang. Dengan dukungan sumber daya aparatur yang berkualitas, organisasi telah siap menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi,

terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dapat berubah setiap waktu.

2. Ketersediaan Peraturan Perundangan

Implikasi perubahan tata kelola pemerintahan guna terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatis, dan akuntabel adalah terbitnya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya bersifat mengatur dan menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah, baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Hampir semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya. Ketersediaan berbagai peraturan perundangan tersebut tentu saja akan memudahkan organisasi pemerintah dan aparatur di dalamnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena :

- a. peraturan perundangan berfungsi sebagai payung hukum;
- b. sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan sudah jelas;
- c. dapat membantu organisasi jika menghadapi kendala/masalah teknis

3. Penerapan *E-Government*

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dalam tiga dasawarsa terakhir, mendorong semua orang, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, organisasi swasta, dan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada untuk berbagai kepentingan sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam dunia perbankan misalnya, untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan atau nasabah yang tidak terbatas waktu dan tempat, disediakan layanan *Automated Teller Machine* (ATM) - dalam Bahasa Indonesia ATM dikonotasikan menjadi Anjungan Tunai Mandiri. Melalui ATM seorang nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dimana saja (tidak harus datang ke "kantor bank") dan kapan saja (tidak mengenal jam kantor, bisa siang, malam atau hari libur).

ATM mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang, melakukan pengecekan saldo rekening tabungan, mentransfer uang ke pihak lain, membayar tiket pesawat, dan melakukan berbagai pembayaran tagihan rutin, seperti rekening listrik, telepon, dan lainnya, sehingga nasabah tidak perlu dilayani seorang "teller" manusia. ATM sebagai sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk dapat melakukan berbagai layanan perbankan, merupakan manifestasi dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan perusahaan bank memberikan pelayanan prima kepada nasabah, sehingga dengan pelayanan tersebut akan membuat nasabah tidak berpaling ke bank lain sekaligus dapat menarik nasabah-nasabah lain untuk menjadi nasabah bank tersebut.

Keberhasilan penggunaan teknologi dan informasi dalam dunia bisnis, menjadi pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam satu dasawarsa

terakhir berbagai perangkat dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, efektif, berbasis transparansi dan akuntabel, telah mulai dilakukan. Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat memiliki akses yang luas, murah, dan cepat untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan publik dari Pemerintah. Proporsional dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi dan layanan publik, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik juga dimanfaatkan Pemerintah untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) dalam rangka memperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan atas pelayanan publik tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat. Berlandaskan kebutuhan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, pemerintah dan pemerintah daerah sedang membangun sebuah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan.

Berbagai bentuk dari pelaksanaan *e-government* tersebut sudah dapat dirasakan tidak saja antar pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat. Jika sebelumnya berbagai laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat harus disampaikan dalam bentuk tercetak dan lewat pos, maka melalui pengembangan *e-government* berbagai laporan tersebut dapat disampaikan secara elektronik melalui internet, yang tentu saja lebih cepat, murah, dan terjamin sampai tujuan. Demikian pula bagi masyarakat, untuk mendapatkan data atau berbagai informasi misalnya, masyarakat tidak perlu mendatangi kantor instansi pemerintah yang jaraknya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer dari tempat tinggalnya. Melalui situs jaringan (*web site*) yang sudah terkoneksi dalam sistem internet, masyarakat bisa mendapatkan data dan informasi tersebut dengan cepat, mudah, aman dan murah. Pengembangan *e-government* terus ditingkatkan pada bidang-bidang lain tidak semata dalam penyajian data dan informasi secara elektronik. Saat ini juga sudah dikembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik atau dikenal dengan *e-procurement*. Tujuan dari penerapan *e-procurement* adalah :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Bagi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah, perwujudan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) tentu menjadi peluang dalam rangka pengembangan pelayanan kinerja OPD. Peluang yang diperoleh dari pelaksanaan *e-government* adalah :

- a. ketersediaan dan kemudahan dalam penyampaian informasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan *stake holder* lainnya;
- b. kuantitas masyarakat yang memberikan aspirasi, masukan, saran, dan informasi lainnya semakin meningkat, karena melalui media elektronik masyarakat tidak harus takut dalam menyampaikan aspirasi, masukan, saran, dan informasi lain;
- c. terdapat efisiensi dari segi biaya karena komunikasi dan penyampaian laporan dapat dilakukan secara elektronik;
- d. penggunaan berbagai aplikasi dalam sistem informasi meningkatkan akurasi, lebih cepat dalam pengerjaan, serta duplikasi data dapat diminimalisasi.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Kota adalah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang meliputi dinas daerah, badan daerah kecamatan dan kelurahan serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, adapun permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Perubahan berbagai peraturan yang begitu cepat yang menyebabkan kesulitan dalam implementasinya.
2. Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan keuangan di OPD masih rendah yang berakibat belum sempurnanya laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Kegiatan-kegiatan oleh OPD lebih banyak dilaksanakan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
4. Masih ditemui adanya kegiatan yang tidak terlaksana, baik sebahagian maupun seluruhnya yang mengakibatkan SILPA.
5. Koordinasi Pembangunan antar OPD belum sepenuhnya efektif.
6. Masih banyak rancangan produk hukum yang diajukan oleh OPD belum sesuai kaidah dan aturan hukum.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**- VISI dan MISI**

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini dan memperhatikan analisis lingkungan internal yang mencakup kekuatan, kelemahan dan lingkungan eksternal mencakup peluang dan tantangan yang dihadapi, dan dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, dengan demikian setidaknya Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dihadapkan pada beberapa isu strategis yang bisa dilakukan agar kinerja Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi bias ditingkatkan dalam kurun 4 (empat) tahun kedepan, antara lain sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi dalam upaya menuju Penyelenggaraan *Good and Clean Governance*;
- b. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih mengedepankan *Customer Satisfaction*;
- c. Kerjasama antar daerah dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan daerah.
- d. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan Kebijakan pimpinan.
- e. Penempatan staf sesuai dengan sdm dan keahliannya
- f. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
- g. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi
- h. Peningkatan kualitas sdm melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
- i. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas sdm

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah pernyataan tentang tujuan dan cita-cita yang realistis dan menarik yang ingin dicapai sebuah organisasi di masa depan. Visi merupakan artikulasi sebuah tempat yang dituju oleh organisasi, sebuah masa depan organisasi yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih diinginkan daripada kini (Nanus, 1992). Berdasarkan pengertian visi di atas dan dari hasil identifikasi isu-isu strategis dan analisis lingkungan internal dan eksternal menggunakan teknik analisis SWOT yang telah dilakukan, Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi menetapkan visinya sebagai berikut:

***SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI MENJADI
ORGANISASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM UPAYA
PEMANTAPAN KOORDINASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH***

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, misi yang akan dicapai adalah:

1. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik, dinamis, dan akuntabel disertai penerapan nilai-nilai spritual dan menjunjung norma-norma yang berlaku;
2. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dan responsif terhadap peraturan dan dinamika yang berkembang serta melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik dan bersih;
3. Mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan keagamaan yang mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan;
4. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan bermartabat untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi;
5. Menyelenggarakan Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah antarkelurahan, antar kecamatan dan antar daerah lainnya;
6. Menyelenggarakan pelayanan kedinasan walikota dan wakil walikota sebagai sarana peningkatan komunikasi dengan masyarakat, pimpinan daerah, organisasi sosial dan kemasyarakatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Menurut Salusu (2000 : 133), tujuan dapat diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif, dan mungkin hanya sebagian yang bisa dicapai. Secara lebih spesifik Thompson dan Strickland (2001 : 9) mendefinisikan tujuan sebagai target-target kinerja organisasi, baik hasil maupun *outcome* yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan tersebut berfungsi sebagai alat ukur dari kinerja dan kemajuan organisasi.

Berdasarkan pengertian tentang tujuan di atas dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Sekretariat Daerah Kota Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun ke depan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Pertama Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Mengembangkan organisasi yang baik dan tanggap perubahan
 - 1.2. Meningkatkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah
 - 1.3. Meningkatkan kualitas spritual, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai agama bagi ASN dan Non-ASN
2. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Daerah
 - 2.2. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD
 - 2.3. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang komunikatif, serta meningkatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat dan *stake holder*.
 - 2.4. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik pada Kecamatan dan Kelurahan
3. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Ketiga Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat masyarakat.
 - 3.2. Meningkatkan upaya pelayanan keagamaan
4. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Keempat Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang efisiensi, efektif, dan akuntabel.

- 4.2. Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kelima Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Meningkatkan akurasi batas wilayah antarkelurahan, antarkecamatan dan antar daerah lainnya.
6. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Keenam Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Meningkatkan komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat, pimpinan daerah, organisasi sosial dan kemasyarakatan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya.
 - 6.2. Meningkatkan kerjasama dengan badan-badan usaha dan pemerintah daerah lainnya.

B. SASARAN

Menurut Collis dan Montgomery (1998 : 8) sasaran merupakan bagian dari tujuan, yaitu tujuan jangka pendek yang disebut *objective*, sedang tujuan jangka panjang disebut *goals*. *Objective* atau sasaran berisi ungkapan kuantitatif yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah. Sedangkan *goals* atau tujuan berisi ungkapan kualitatif yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

Berdasarkan pengertian tentang sasaran di atas dan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yang ingin diwujudkan adalah :

- 1.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Pertama Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 1.1.1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi
 - 1.1.2. Meningkatnya manajemen organisasi
- 1.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Pertama Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 1.2.1. Meningkatnya kinerja, profesionalisme dan disiplin ASN Sekretariat Daerah.
- 1.3. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Ketiga dari Misi Pertama Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 1.3.1. Meningkatnya kesadaran keagamaan ASN
- 2.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 2.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.2.1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan OPD
 - 2.2.2. Meningkatnya Kualitas Rancangan Produk Hukum Daerah yang disusun OPD

- 2.2.3 Meningkatnya penyelesaian examisasi atas Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan OPD
- 2.3 Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Ketiga dari Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.3.1 Meningkatnya informasi kegiatan Pemerintah dan Pembangunan kepada masyarakat
- 2.4 Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Keempat dari Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.4.1 Meningkatnya pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayana Publik pada Kecamatan dan Kelurahan
- 3.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Ketiga Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 3.1.1. Meningkatnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Ketiga Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 3.2.1. Meningkatnya upaya pelayanan keagamaan kepada masyarakat
- 4.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Keempat Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 4.1.1. Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan daerah
- 4.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Keempat Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 4.2.1 Meningkatnya kinerja, profesionalisme dan disiplin aparatur pemerintah daerah.
- 5.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Kelima Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 5.1.1. Meningkatnya kesesuaian batas wilayah antarkelurahan, antarkecamatan dan antardaerah lainnya.
- 6.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Keenam Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 6.1.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat pimpinan daerah, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah
- 6.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Keenam Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 6.2.1. Meningkatnya kerjasama dengan badan-badan usaha dan pemerintah daerah lainnya

Tabel C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				OPD	
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	100	100	- Bagian Organisasi	
				86.15	86.20	86.25	86.30	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	Bagian Organisasi	
			Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	100	100	100	100	Bagian Umum	
		Meningkatnya pelayanan kedinasan wali kota dan wakil wali kota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	90	95	100	100	Bagian Umum	
				100	100	100	100	Bagian Protokol dan Humas Pimpinan	
		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	30	35	40	40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada Semester I	35	40	45	50	Bagian Administrasi Pembangunan
				Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada Semester I	35	40	45	50	Bagian Administrasi Pembangunan
				Jumlah SKPD yang nilai IKM-nya kategori Sangat Baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan					Bagian Organisasi
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	(Jumlah kecamatan dengan kategori baik / Jumlah kecamatan) X 100%	50	55	60	65	Bagian Pemerintahan	
				(Jumlah kelurahan dengan kategori baik / Jumlah kelurahan) X 100%	50	55	60	65	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya perkembangan kelurahan	(Jumlah kelurahan kategori cepat berkembang / Jumlah kelurahan) X 100%	81	82	83	84	Bagian Pemerintahan	
		Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	(Jumlah rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik / Jumlah rancangan produk hukum) X100%	100	100	100	100	Bagian Hukum	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				OPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya kinerja PDAM Tirta Bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang meliputi penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan, dan penilaian pelayanan.	3.14	3.14	3.14	3.14	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah disiapkan, sedangkan kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2023-2026 seperti pada tabel C.26

Tabel C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI :								
MISI :								
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		OPD
1	2	3		4		5		6
1	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Peningkatan kehadiran pemerintah di seluruh aspek kehidupan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Bagian Organisasi
				1.2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di bidang Bina mental Spiritual, Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial,	1.2.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Publik di bidang Bina Mental Spritual, Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	2.1	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja	2.1.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja	Bagian Organisasi
				2.2	Meminimalkan Resiko Temuan Penatausahaan Keuangan dan Aset	2.2.1	Menyelesaikan Resiko Temuan Penatausahaan Keuangan dan Aset	Bagian Umum
		3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan wali kota dan wakil wali kota	3.1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	3.1.1	Memfasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				3.2	Pengelolaan manajemen pemerintahan yang mengacu pada pelayanan prima	3.2.1	Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan dan pemerintah daerah	Bagian Umum

VISI :								
MISI :								
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		OPD
1	2	3		4		5		6
		4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	4.1	Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Yang Transparan Konsisten dan Akuntabel.	4.1.1	Peningkatan pelayanan publik penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam hal ini bagian layanan pengadaan perlu mendapat perhatian khusus.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				4.2	Meningkatkan kualitas administrasi pembangunan daerah	4.2.1	Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan	Bagian Administrasi Pembangunan
				4.3	Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4.3.1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan
				4.4		4.4.1		
		5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	5.1	Menata SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	5.1.1	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan
				5.2	Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	5.1.2	Optimalisasi Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan
		6.	Meningkatnya perkembangan kelurahan	6.1	Mengikuti peran sertakan Masyarakat dalam Pembangunan	6.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Bagian Pemerintahan Desa

VISI :								
MISI :								
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		OPD
1	2	3		4		5		6
		7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	7.1	Merwujudan Kepastian Hukum dalam setiap kegiatan pemerintah	7.1.1	Melakukan kajian hukum terhadap produk-produk kebijakan daerah	Bagian Hukum
		8.	Meningkatnya kinerja PDAM Tirta Bulian	8.1	Tingkat Kesehatan PDAM Tirta Bulian	8.1.1	Tingkat Kesehatan PDAM Tirta Bulian merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang meliputi penilaian Kinerja, Penilaian Tingkat Kesehatan dan Penilaian pelayanan	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam
1	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Perwujudan aksesibilitas dan transparansi kegiatan pemerintahan	1.1.1	Menerapkan informasi teknologi yang akurat untuk setiap program penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik agar tercipta efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka perlu diimplementasikan kedalam program dilengkapi dengan indicator atau *outcome* program beserta target capaian dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan dapat di lihat pada Tabel C.27 berikut ini:

Tabel C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1 Tahun	1.622.014.460	1 Tahun	1.872.014.460	1 Tahun	2.122.014.460	1 Tahun	2.372.014.460	1 Tahun	2.372.014.460	Bagian Pemerintahan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		1 Tahun	1280904790	1 Tahun	1.430.904.790	1 Tahun	1.580.904.790	1 Tahun	1.730.904.790	1 Tahun	1.730.904.790	Bagian Pemerintahan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	210.000.000	1 Tahun	260.000.000	1 Tahun	260.000.000	Bagian Pemerintahan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahn		1 Tahun	924.708.400	1 Tahun	974.708.400	1 Tahun	1.024.708.400	1 Tahun	1.074.708.400	1 Tahun	1.074.708.400	Bagian Pemerintahan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Tahun	246.196.390	1 Tahun	296.196.390	1 Tahun	346.196.390	1 Tahun	396.196.390	1 Tahun	396.196.390	Bagian Pemerintahan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah		1 Tahun	341109670	1 Tahun	441.109.670	1 Tahun	541.109.670	1 Tahun	641.109.670	1 Tahun	641.109.670	Bagian Pemerintahan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		1 Tahun	330.281.050	1 Tahun	380.281.050	1 Tahun	430.281.050	1 Tahun	480.281.050	1 Tahun	480.281.050	Bagian Pemerintahan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		1 Tahun	10.828.620	1 Tahun	60.828.620	1 Tahun	110.828.620	1 Tahun	160.828.620	1 Tahun	160.828.620	Bagian Pemerintahan	Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100%	1.069.443.200	100%	1.176.387.520	100%	1.294.026.272	100%	1.423.428.900	100%	1.423.428.900	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan		100%	427.777.280	100%	470.555.008	100%	517.610.508	100%	569.371.560	100%	569.371.560	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		100%	267.360.800	100%	294.096.880	100%	323.506.568	100%	355.857.225	100%	355.857.225	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan		100%	374.305.120	100%	411.735.632	100%	452.909.196	100%	498.200.115	100%	498.200.115	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Persentase jumlah SKPD yang realisasi keuangannya ≥40% pada Semester I - Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya ≥50% pada Semester I		100%	1.144.000.000	100%	1.372.800.000	100%	1.601.600.000	100%	1.830.900.000	100%	1.830.900.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	- Persentase SKPD yang menargetkan realisasi keuangan pada DPA-SKPD ≥50% pada Semester I - Persentase SKPD yang menargetkan realisasi fisik kegiatan pada DPA-SKPD ≥50% pada Semester I		100%	1.144.000.000	100%	1.372.800.000	100%	1.601.600.000	100%	1.830.900.000	100%	1.830.900.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		100%	375.000.000	100%	450.000.000	100%	525.000.000	100%	600.500.000	100%	600.500.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		100%	389.000.000	100%	466.800.000	100%	544.600.000	100%	622.400.000	100%	622.400.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		100%	380.000.000	100%	456.000.000	100%	532.000.000	100%	608.000.000	100%	608.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kota Tebing Tinggi
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Paket Pengadaan Barang / Jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada bagian pengadaan barang dan jasa 4 Bulan setelah APBD di sahkan												Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Tebing Tinggi
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang / Jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada bagian pengadaan barang dan jasa 4 Bulan setelah APBD di sahkan												Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Tebing Tinggi
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	414.337.000	100%	476.487.550	100%	547.960.700	100%	630.154.785	100%	630.154.785	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Pengelolaan Layanan Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Operasional LPSE dan SIRUP dalam pengadaan Barang dan Jasa, Terlaksananya Pelayanan Operasional LPSE di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.		100%	447.169.000	100%	514.244.350	100%	591.381.000	100%	680.088.200	100%	680.088.200	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Tebing Tinggi	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100%	323.519.300	100%	372.047.200	100%	372.047.200	100%	492.032.415	100%	492.032.415	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Tebing Tinggi	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi	4.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhiya urusan penunjang pemerintahan daerah kota														
		4.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah														
		4.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN Sekretariat Daerah dan insentif pajak daerah dan retribusi serta gaji, tunjangan dan belanja operasional kdh wkdh		12 bulan	16.678.000.000	12 bulan	16.478.000.000	12 bulan	16.378.000.000	12 bulan	16.310.699.000	12 bulan	16.310.699.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi	
		4.01.2.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhiya Catatan Atas laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya pertanggung jawaban barang milik daerah												Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi		100%	380.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan sandang pegawai												Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhiya pakaian dinas Kdh dan Wkdh Terpenuhiya pakaian kerja lapangan (penerima tamu rumah dinas)		100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan umum perangkat daerah												Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan di sekretariat daerah		100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya peralatan kebersihan kantor		100%	60.000.000		60.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK untuk kelancaran tugas dan kegiatan di Sekretariat Daerah		100%	60.000.000		90.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100%	40.000.000		69.400.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi Kdh dan Wkdh		100%	1.900.000.000		1.900.000.000	100%	1.932.966.000	100%	1.932.966.000	100%	1.932.966.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya kegiatan untuk rapat dan koordinasi ke dalam dan luar daerah		100%	1.700.000.000		1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah												Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kendaraan dinas jabatan		100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya pengadaan mebeleur		100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan kantor dan rumah dinas		100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang pemerintah daerah												Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaga kebersihan kantor sekretariat pemko tebing tinggi		100%	1.900.000.000	100%	2.100.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi												Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan Genset, kendaraan dinas, Pajak STNK dan BBM kendaraan dinas		100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan di rumah jabatan/ dinas, Terpeliharanya peralatan di sekretariat daerah, Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor sekretariat daerah		100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya taman dan bangunan gedung sekretariat daerah, Terpeliharanya taman dan bangunan rumah jabatan/dinas		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
	Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	4.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya keuangan dan operasional KDh dan WKDh												Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana penunjang Operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah		12 bulan	750.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	750.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan rumah tangga KDh/ WKDh												Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhiya belanja dapur, perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi Kdh dan Wkdh		100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
		4.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhiya belanja dapur, perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi Kdh dan Wkdh		100%	432.000.000	100%	432.000.000	100%	432.000.000	100%	432.000.000	100%	432.000.000	Bagian Umum	Kota Tebing Tinggi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Meningkatnya tata kelola Kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan public, tata laksana, kinerja dan Reformasi Birokrasi													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	130.000.000	10 dokumen	140.000.000	10 dokumen	150.000.000	10 dokumen	150.000.000	Bagian Organisasi	Kota Tebing Tinggi
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi pelayanan Publik dan tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		8 laporan	120.000.000	9 laporan	150.000.000	10 laporan	160.000.000	11 laporan	170.000.000	11 laporan	170.000.000	Bagian Organisasi	Kota Tebing Tinggi
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		15 Dokumen	700.000.000	15 Dokumen	800.000.000	15 Dokumen	900.000.000	15 Dokumen	1.000.000.000	15 Dokumen	1.000.000.000	Bagian Organisasi	Kota Tebing Tinggi
		4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		8 dokumen	50.000.000	8 dokumen	60.000.000	8 dokumen	70.000.000	8 dokumen	80.000.000	8 dokumen	80.000.000	Bagian Organisasi	Kota Tebing Tinggi
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		33 dokumen	50.000.000	33 dokumen	60.000.000	33 dokumen	70.000.000	33 dokumen	80.000.000	33 dokumen	80.000.000	Bagian Organisasi	Kota Tebing Tinggi
	Meningkatkan Kinerja PDAM Tirta Bulian	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah		100%	1.100.000.000		1.253.000.000		1.317.000.000		1.388.500.000		5.058.500.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian		50 lap	874.000.000	51 lap	1.010.000.000	51 lap	1.065.000.000	51 lap	1.127.500.000	203 lap	4.076.500.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		24 Dok	56.000.000	24 Dok	60.000.000	24 Dok	65.000.000	24 Dok	70.000.000	96 Dok	251.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Pendistribusian Perekonomian	Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian		22 Lap	670.000.000	22 Lap	750.000.000	22 Lap	800.000.000	22 Lap	850.000.000	88 Lap	3.070.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan pengawasan ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		3 Dok	123.000.000	3 Dok	150.000.000	3 Dok	175.000.000	3 Dok	180.000.000	12 Dok	628.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD		1 Dok	25.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	25.000.000	2 Dok	27.500.000	7 Dok	127.500.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.04	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Laporan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam		16 Dok	226.000.000	16 Dok	243.000.000	16 Dok	252.000.000	16 Dok	261.000.000	64 Dok	982.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, dan perikanan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM penanaman modal, tenaga kerja		2 Dok	6.500.000	2 Dok	8.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	12.000.000	8 Dok	36.500.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	2023	Target	2024	Target	2025	Target	2026	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian		2 Dok	7.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	12.000.000	2 Dok	14.000.000	8 Dok	43.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian		12 Dok	212.500.000	12 Dok	225.000.000	12 Dok	230.000.000	12 Dok	235.000.000	48 Dok	902.500.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat													Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Dilaksanakannya Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.		1 Tahun	473.816.970	1 Tahun	516.891.240	1 Tahun	559.965.510	1 Tahun	603.039.780	1 Tahun	646.114.050	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1 Tahun	8.016.499.480	1 Tahun	8.745.272.160	1 Tahun	9.474.044.840	1 Tahun	10.202.817.520	1 Tahun	10.931.590.200	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kota Tebing Tinggi
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1 Tahun	158.729.120	1 Tahun	173.159.040	1 Tahun	187.588.960	1 Tahun	202.018.880	1 Tahun	216.448.800	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kota Tebing Tinggi

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusabn dapat dilihat pada Tabel C.28 berikut :

Tabel C. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		100	100	100	100	100
			86.20	86.30	86.40	86.50	86.50
2	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		100	100	100	100	100
3	Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan		100	100	100	100	100
4	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu		90	95	100	100	100
			100	100	100	100	100
5	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan		30	35	40	40	40
6	Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada Semester I		35	40	45	50	50
7	Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada Semester I		35	40	45	50	50
8	Jumlah SKPD yang nilai IKM-nya kategori Sangat Baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan		31.00	32.25	33.06	35.00	35.00
9	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik		50	55	60	65	65
10	Jumlah Kelurahan dengan kategori baik		50	55	60	65	65
11	Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang		81	82	83	84	84
12	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik		100	100	100	100	100
13	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian		3.14	3.14	3.14	3.14	3.14

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah Terpilih. Berkenaan dengan berakhirnya Masa Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2017 – 2022, Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi Tahun 2013–2033, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi. Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi kinerja yang baik.

Keberhasilan implementasi Renstra ini juga sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media.